

## Banjir dan Longsor di Bogor, 5.700 Meter Sawah Gagal Panen

**BOGOR (IM)** - Sektor ekonomi menjadi salah satu yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Total, 5.700 meter persegi area persawahan di wilayah tersebut rusak.

“Yang di Pamijahan sub sektor ekonomi pertanian (sawah) dengan luas sekitar 5.700 meter persegi terdampak bencana,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Senin (27/6).

Kemudian, perkebunan palawija warga terdampak dengan luas sekitar 10.600 meter persegi. Termasuk hewan ternak juga terdampak bencana tersebut.

“Sub sektor peternakan 5 ekor kambing dan sub sek-

tor perikanan 3 kolam rusak dengan total ikan siap panen sebanyak kurang lebih 5 ton,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut Aris, berdasarkan data sementara terdapat 94 rumah warga yang terdampak banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, 73 rumah rusak ringan, 7 rusak sedang dan 14 rusak berat.

“Sementara 12 kampung yang terdampak bencana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, bencana banjir dan longsor melanda wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Rabu 22 Juni 2022. Puluhan rumah warga rusak, beberapa jembatan putus dan dua orang meninggal dunia dalam bencana di wilayah ini. ● **gio**

## Harga Migor di Bogor Turun, Kini Rp15.000 Per Kilogram

**BOGOR (IM)** - Harga minyak goreng (migor) di pasaran di Kota Bogor terus turun karena dilakukan pengawasan ketat oleh satgas migor. Di Pasar Bogor, Senin (27/6) pagi harga minyak goreng curah Rp 15.000 per kilogram. Meski harga ini belum turun benar tetapi sejumlah pedagang mengaku kondisinya sudah lebih baik jika dibanding pekan sebelumnya.

Penurunan harga minyak goreng di Kota Bogor ini terus terjadi secara periodik dengan besaran tidak menentu.

Zaki (36), pedagang kelontong di Pasar Bogor, mengungkapkan bahwa harga migor pada Senin pagi ini turun menjadi Rp 15.000/kg. Harga ini berlaku untuk pembelian partai besar di mana pembeli minimal membeli 10 kg.

Untuk penjualan dengan partai kecil di bawah lima kilogram para pedagang masih mengenakan harga Rp 16.000

per kilogram. “Beli banyak kan untuk dijual lagi, jadi kena Rp 15.000. Kalau untuk konsumsi sendiri masih kena Rp 16.000,” ungkapnya.

Zaki mengungkapkan, penurunan harga ini terjadi karena harga dari tingkat agen dan distributor juga terus menurun. Para pedagang mengambil stok dagangan dari agen hari ini dengan patokan harga Rp 13.500 per kilogram.

Sementara itu para pembeli mengaku dengan penurunan harga ini bisa bernafas lega karena harga terus turun.

Seperti diakui Ny Salamah (36), warga Tanah Baru, Kota Bogor. “Ya lumayan, kan, harga cabai naik, beberapa barang juga naik. Minyak turun sedikit bisa mengurangi pengeluaran,” ungkapnya.

Meski demikian, warga maupun pedagang berharap harga minyak goreng curah kembali seperti harga dulu yaitu di bawah Rp 13.000 per kilogram. ● **gio**



IDN/ANTARA

### KASUS DEMAM BERDARAH DI TASIKMALAYA

Petugas melakukan fogging atau pengasapan di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (27/6). Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 1.059 orang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan jumlah kematian sebanyak 16 orang.

### BENCANA ALAM DI PAMIJAHAN

## Pemkab Didorong Segera Ajukan Bankeu untuk Rekonstruksi Infrastruktur

**CIBINONG (IM)** - Pemkab Bogor diminta cepat dalam melakukan pendataan korban terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Desa Purasari, Leuwiliang dan Desa Cibunian, Pamijahan.

Hal itu karena data prakiraan kerugian bencana alam, atau kebutuhan anggaran rekonstruksi jalan, jembatan, tanggul penahan tanah (TPT), bangunan sekolah, sarana ibadah dan lainnya di Pamijahan tersebut akan diajukan ke Pemprov Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Pemprov Jawa Barat telah memberikan bantuan untuk kebutuhan tanggap darurat, berupa uang sebesar Rp 500 juta akibat insiden bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor di Pamijahan.

Ia pun, berjanji akan memberikan tambahan anggaran untuk merekonstruksi beragam infrastruktur. Namun dibutuhkan kecepatan dalam pendataan infrastruktur terdampak bencana alam yang terjadi Rabu malam, (22/6) kemarin.

“Saya sarankan agar Pemkab Bogor segera mendata jalan, jembatan, TPT, bangunan sekolah, sarana ibadah dan lainnya yang ru-

sak. Data tersebut menjadi dasar kebutuhan permohonan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat akan kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi atau membangun kembali,” kata anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin (27/6).

Asep Wahyuwijaya menuturkan bahwa kita berlomba dengan waktu dengan penyusunan anggaran pedapangan belanja daerah-peubahan (APBD-P) Tingkat I atau Jawa Barat. “Pendataan infrastruktur terdampak bencana alam harus cepat sebelum Pemprov Jawa Barat menyetujui APBD-P, semoga di tahun ini juga bisa dilakukan rekonstruksi infrastruktur tersebut,” tutur Adep Wahyuwijaya.

Ia juga menyarankan agar kebutuhan anggaran rekonstruksi infrastruktur akibat bencana alam ‘dipecah’ hingga tidak butuh waktu lama dalam penyelesaian pekerjaannya.

“Anggaran bisa ‘dipecah’ hingga waktu pekerjaan maksimal 4 bulan atau 120 hari, satu kerja perangkat daerah (SKPD) terkait diharapkan kerja cepat, cermat dan kompak,” tukasnya. ● **gio**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### GANJAR PRANOWO BUKA BOROBUDUR STUDENT FESTIVAL 2022

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) berinteraksi dengan sejumlah perwakilan pelajar dari berbagai provinsi saat membuka Borobudur Student Festival 2022 di Canisio Art Centre Borobudur, Magelang, Jawa Tengah Senin (27/6). Ganjar mengapresiasi kegiatan tersebut karena peserta bisa saling mengenal antarsuku, agama, seni budaya dan kuliner yang berbeda dari berbagai daerah dan menumbuhkan bangga.

## Pamijahan 2 Kali Dilanda Longsor, Pemkab Bogor Kaji Relokasi Warga

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan relokasi warga harus dilakukan jika hasil kajian kawasan Pamijahan merupakan zona merah. Dia ingin warga tinggal di wilayah yang aman dan nyaman. Kalau memang sudah zona merah, ya kita harus relokasi, katanya.

**BOGOR (IM)** - Bencana tanah longsor di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, juga pernah terjadi pada 2015. Pemkab Bogor mengkaji untuk merelokasi warga.

“Saya minta nanti dari tim mitigasi BPBD dan melalui kajian dari yang punya disiplin ilmu di bidang geologi untuk memetakan, ini jalur apakah zona merah atau hijau,” kata Plt Bupati Bogor, Iwan Se-

tiawan, setelah mengunjungi lokasi bencana, Senin (27/6). Iwan mengatakan relokasi warga harus dilakukan jika hasil kajian kawasan Pamijahan merupakan zona merah. Dia ingin warga tinggal di wilayah yang aman dan nyaman.

“Kalau memang sudah zona merah, ya kita harus relokasi. Dulu katanya ini keinginannya warga. Padahal, dari sisi kelayakan, sangat berbahaya. Nah ini nggak usahlah ada warga pingin di sini. Jadi kami

ingin aman, nyaman, kalau masalah hidup ini sudah ada yang ngatur. Tidak mungkin lah kita memindahkan ke tempat yang benar-benar terisolir,” tambahnya.

Iwan menyebut akan memberi bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Dia juga siap menyewakan kontrakan kepada warga sambil menunggu hunian siap ditempati.

“Yang penting menyelamatkan dulu. Nanti jadi relokasinya berdasarkan kajian. Nah, hari ini dua kecamatan ini, satu untuk rumah yang rusak ringan atau memang masih bisa, ya kita bantu Rp 5 juta. Yang sedang Rp 10 juta. Kalau Rp 25 juta yang berat. Kalau memang harus direlokasi, kami bantu Rp 62 juta,” jelasnya.

“Kedua, yang selama ini belum ada huntut dan lain sebagainya masih direlokasi, kami minta untuk keluarga

yang terisolir atau yang di lokasi, kita sudah siapkan anggaran untuk sewa. Selama rumah itu belum jadi, sewanya kita tanpa batas,” ucapnya.

Seperti diketahui, pernah terjadi tanah longsor di Pamijahan pada 2015. Lokasinya berdekatan dengan lokasi longsor yang terjadi pada Jumat (24/6) kemarin.

Warga Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,

Een (48), bersama Nur Sih (55) dan Euis (28) mengatakan dia mengalami trauma karena dua kali terkena bencana tanah longsor. Longsor sebelumnya itu terjadi tujuh tahun lalu.

“Iya, jadi saya dua kali kena dampak (tanah longsor). Sebelumnya tujuh tahun lalu, tahun 2015 di sini yang longsor itu, di atas yang longsor,” kata Een kepada wartawan di sekitar lokasi tanah longsor, Bogor, Sabtu (25/6). ● **gio**

## Pemkot Tangerang Gelar Jobfair Hadirkan 1.255 Lowongan

**TANGERANG (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali menggelar Virtual Jobfair bulanan, pada Kamis (30/6) mendatang. Pada Jobfair kali ini, Disnaker Kota Tangerang membuka 1.255 lowongan pekerjaan dengan 85 formasi jabatan dari 19 perusahaan yang terlibat.

“Lowongan ini tersedia untuk Lulus SMP 10 orang, SMA/SMK 923 orang, D3 164 orang dan lulusan S1 158 orang,” kata Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, Senin (27/6).

Para pelamar lanjut Ujang, bisa mengirimkan berkas lamarannya melalui aplikasi Tangerang LIVE seperti bulan-bulan sebelumnya. “Jadi, pastikan sudah mendownload Tangerang LIVE dan akunnya sudah terverifikasi,” jelas dia.

Ujang juga mengimbau, bagi para pelamar yang sekiranya akan mengikuti Virtual Jobfair bulan ini, dapat mengikuti pemaparan seluruh

perusahaan yang membuka lowongan kerja, lewat siaran langsung youtube chanel Kota Tangerang pada Kamis (30/6) pukul 09.00 hingga selesai.

Karena kata dia, lewat siaran langsung ini, perusahaan akan memaparkan terkait lowongan hingga pegawai seperti apa yang dicari. Sehingga, para pelamar bisa lebih yakin, apakah mereka cocok dan mampu bekerja di perusahaan tersebut. “Di kesempatan ini juga dibuka sesi tanya jawab,” kata dia. Lebih jauh Ujang menjelaskan sejak 2020 hingga saat ini, ada 8.886 pelamar dari kota Tangerang dan 592 pelamar dari luar kota Tangerang yang diterima bekerja lewat Virtual Jobfair tersebut. “Kami harap, dengan ribuan lowongan yang dibuka setiap bulan ini seiring dengan kemampuan atau kompetensi masyarakat. Sehingga, kebutuhan yang dicari oleh perusahaan, dan program virtual jobfair bisa berjalan dengan baik dan sesuai keinginan kita,” kata dia. ● **pp**

## Ombudsman Jabar Beri Saran Disdik Jabar Bentuk Mekanisme Pengawasan

**BANDUNG (IM)** - Guna menghindari terjadinya pungutan liar (pungli) pada PPDB Tahap II di Jabar, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat memberikan saran.

Saran tersebut adalah, bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk mekanisme pengawasan dan pengaduan internal (whistleblowing system).

“Kita menyadari bahwa pungli adalah isu yang bisa sensitif mengingat posisi orang tua siswa yang seringkali berada dalam posisi yang tidak nyaman,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, Senin (27/6).

“Begitu juga untuk PPDB pendidikan dasar oleh Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pada satu sisi hal ini merupakan realisasi dari pernyataan Gubernur Jawa Barat pada saat membuka PPDB tahun 2022 untuk melakukan pemantauan terhadap indikasi pungutan liar dalam tahapan pelaksanaan PPDB dan menjadikan wilayah Jawa barat siaga satu terhadap pungutan liar.

“Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mendukung dan mendorong Tim Saber Pungli untuk meneruskan proses pengawasan punli secara menyeluruh dan menuntaskan pemeriksaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Dan Satriana.

Dia menambahkan, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB, telah mengamanahkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, serta pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

“Sumbangan pendidikan dapat diselenggarakan dengan kondisi bahwa telah disepakati bersama antara orang tua murid, komite sekolah, dengan pihak sekolah. Sumbangan Pendidikan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan,” tambahnya. ● **pur**

## Jalur Masuk Hewan Kurban ke Banten Ditutup, Kecuali dari Lampung

**TANGSEL (IM)** - Menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1443 Hijriyah/2022 Masehi, jalur masuk hewan kurban ke Tangerang Selatan (Tangsel) serta kota/kabupaten se-Provinsi Banten ditutup mulai Senin (27/6). Hal itu sejalan dengan upaya menekan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan (DKP3) Kota Tangsel, Yepi Suherman mengatakan, kebijakan itu merupakan keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten. Aturan penutupan jalur masuk diberlakukan di semua kota/ kabupaten di Provinsi Banten.

“Ini hasil kita bahas dengan Pemerintah Provinsi Banten, kita kan enggak ada pejabat otoriter untuk mengizinkan situasi hewan ter-

nak. Nah Pemprov Banten yang mengeluarkan, kemarin terakhir tanggal 24 Juni untuk hewan kurban, tapi dengan perhitungan perjalanan waktu, mungkin dari Jawa, Bali, tanggal 27 Juni yang terakhir masuk ke Banten,” kata Yepi saat dihubungi, Senin (27/6).

Namun Yepi menyebut, sejauh ini, aturan itu diberlakukan pengecualian bagi Lampung karena merupakan zona hijau. Hewan kurban dari daerah Lampung masih bisa diterima selama lulus pengecekan kesehatan.

“Tapi untuk wilayah zona hijau seperti Lampung, masih memungkinkan di atas tanggal 27 Juni. Yang penting ada SKKH (surat keterangan kesehatan hewan), kami masih terima sampai waktu yang belum ditentukan oleh Pemprov Banten,” terangnya.

Yepi menegaskan, Pem-

prov Banten yang melakukan seleksi untuk memutuskan bisa atau tidaknya hewan kurban masuk ke wilayah Banten. Namun, pergerakan atau distribusi hewan kurban di wilayah Banten atau antar kota/ kabupaten se-Banten masih bisa dilakukan untuk memenuhi stok dalam provinsi.

“Kami sudah komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, kalau ada kekurangan stok bisa kontak rumah kota/kabupaten lain di Banten, misalnya Serang, Pandeglang, Cilegon, Kota Tangerang untuk mengirimkan ke Tangsel. Tinggal dihubungkan pelapak (di Tangsel) dengan pelapak yang ada di sana,” jelasnya.

DKP3 Kota Tangsel mencatat jumlah hewan kurban di Tangsel sekitar 13 ribuan. Sedangkan kebutuhan masyarakat mencapai 15 ribu ekor hewan kurban. ● **pp**



IDN/ANTARA

### PRODUKSI KERIPIK GEDEBOG PISANG

Perajin memotong gedebog pisang untuk dijadikan olahan kripik di Kedai Umi Yus, depok, Jawa barat, Senin (27/6). Produksi kripik tersebut menggunakan bahan dari batang pohon pisang atau gedebog pisang yang dijual dengan harga Rp 25 ribu per bungkus dan dipasarkan secara daring.